



KRISIS KEPEMIMPINAN PASCA-KEMATIAN SAIF AL-ISLAM GADDAFI: IMPLIKASINYA TERHADAP STABILITAS POLITIK DI LIBYA

LEADERSHIP CRISIS FOLLOWING THE DEATH OF SAIF AL- ISLAM GADDAFI: ITS IMPLICATIONS FOR POLITICAL STABILITY IN LIBYA

**Widi Hermayanti Susilo^{1*}, Imeliana Syahira Putri Febbyanti², Slamet Muliono
Redjosari³**

^{1*}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Email : 10020224073@uinsa.ac.id

²Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Email : Imeehime07@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Email : smuliono@uinsa.ac.id

*email koresponden: 10020224073@uinsa.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijis.v2i2.2597>

Abstract

This study analyzes the leadership crisis following the death of Saif al-Islam Gaddafi and its implications for political stability in Libya after the collapse of Muammar Gaddafi's regime in 2011 within the context of the Arab Spring. Since then, Libya has experienced political fragmentation due to weak state institutions, the growing influence of non-state actors, and prolonged power struggles. In this situation, Saif al-Islam was perceived as possessing symbolic legitimacy and the potential to consolidate fragmented political forces. This research employs a qualitative approach through a case study and descriptive-analytical analysis based on secondary data obtained from academic journals, international reports, and credible media sources, using the theoretical frameworks of charismatic leadership, succession crisis, and the concept of a failed state. The findings indicate that his death deepened the leadership crisis by removing a potential unifying figure, strengthening the role of militias, and increasing the risk of conflict, while also reflecting the state's limited capacity to control violence. The study concludes that Libya's political stability depends not only on institutions but also on the presence of a figure capable of consolidating power. The absence of such a figure in a fragile state increases the risk of long-term instability; therefore, strengthening state institutions remains the key to sustainable political stability.

Keywords : *Libya, Saif al-Islam Gaddafi, Leadership Crisis, Failed State, Political Stability.*



Abstrak

Penelitian ini menganalisis krisis kepemimpinan pasca-kematian Saif al-Islam Gaddafi dan implikasinya terhadap stabilitas politik di Libya setelah runtuhnya rezim Muammar Gaddafi pada 2011 dalam konteks Arab Spring. Sejak saat itu, Libya mengalami fragmentasi politik akibat lemahnya institusi negara, menguatnya aktor non-negara, dan konflik kekuasaan berkepanjangan. Dalam situasi tersebut, Saif al-Islam dipandang memiliki legitimasi simbolik dan potensi untuk mengkonsolidasikan kekuatan politik yang terpecah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus dan analisis deskriptif-analitis berbasis data sekunder dari jurnal, laporan internasional, dan media terpercaya, dengan kerangka teori kepemimpinan karismatik, krisis suksesi, dan konsep failed state. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kematiannya memperdalam krisis kepemimpinan dengan menghilangkan figur potensial pemersatu, memperkuat peran milisi, serta meningkatkan risiko konflik, sekaligus mencerminkan lemahnya kapasitas negara dalam mengendalikan kekerasan. Disimpulkan bahwa stabilitas politik Libya tidak hanya bergantung pada institusi, tetapi juga pada keberadaan figur yang mampu mengkonsolidasikan kekuasaan; ketiadaan figur tersebut di negara yang rapuh memperbesar risiko instabilitas jangka panjang, sehingga penguatan institusi menjadi kunci stabilitas berkelanjutan.

Kata Kunci : Libya, Saif al-Islam Gaddafi, Krisis Kepemimpinan, Negara Gagal, Stabilitas Politik.

1. PENDAHULUAN

Sejak jatuhnya rezim Muammar Gaddafi pada tahun 2011, Libya mengalami ketidakstabilan politik yang berkepanjangan. Peristiwa tersebut terjadi dalam konteks Arab Spring yang mendorong runtuhnya berbagai rezim otoriter di Timur Tengah. Namun, berbeda dengan harapan awal, jatuhnya Muammar Gaddafi ini tidak langsung membawa Libya menuju kepada stabilitas. Alih-alih memasuki masa transisi demokrasi yang stabil, namun justru malah sebaliknya, negara ini mengalami ketidakstabilan politik yang berkepanjangan. Arab Spring membawa perubahan besar, tetapi tidak diikuti dengan terbentuknya sistem pemerintahan yang kuat. Akibatnya, Libya justru terjebak dalam beberapa masalah mulai dari menghadapi konflik internal, munculnya berbagai kelompok bersenjata, serta perebutan kekuasaan yang mengakibatkan terbentuknya dua pemerintahan yang saling bersaing.

Dalam situasi yang kacau ini, kehadiran figur pemimpin yang memiliki pengaruh luas menjadi hal yang sangat penting. Salah satu tokoh yang dianggap memiliki peran strategis adalah Saif al-Islam Gaddafi, putra dari Muammar Gaddafi. Meskipun Muammar Gaddafi memiliki banyak anak, Saif al-Islam Gaddafi ialah anak yang kedua dari Muhammad Gaddafi yang aktif dan memiliki ketertarikan kepada hal politik dibandingkan saudara-saudaranya karena latar belakang pendidikan dan perannya di tingkat internasional. Ia menempuh pendidikan di luar negeri, serta aktif dalam berbagai kegiatan diplomasi melalui lembaga yang dipimpinnya. Hal ini membuatnya dikenal sebagai sosok yang lebih modern, rasional, dan mampu berkomunikasi dengan dunia Barat. Selain itu, Saif dianggap memiliki kemampuan politik yang lebih “diterima” oleh komunitas internasional dibandingkan saudara-saudaranya yang lain, yang cenderung berperan di bidang militer atau keamanan. Karena citranya yang reformis dan keterlibatannya dalam negosiasi penting seperti upaya normalisasi hubungan Libya dengan Barat, ia dipandang sebagai kandidat paling realistis untuk melanjutkan kepemimpinan ayahnya. Oleh karena itu, meskipun tidak pernah ada penunjukan resmi, banyak pihak melihat Saif sebagai penerus *de facto*. Namun, posisinya menjadi kompleks karena saat konflik tahun 2011, ia tetap berpihak pada rezim dan terlibat dalam upaya mempertahankan kekuasaan. Hal ini membuat citra reformis yang melekat padanya menjadi dipertanyakan, sekaligus menjadikannya figur yang



kontroversial dalam politik Libya. Ia pernah dipersiapkan sebagai penerus kepemimpinan dan dikenal sebagai sosok yang membawa citra reformis Libya, terutama melalui keterlibatannya dalam diplomasi internasional dan upaya normalisasi hubungan dengan negara-negara Barat. Namun, perannya dalam mendukung rezim saat konflik 2011 juga membuatnya menjadi figur yang kontroversial. Setelah sempat menghilang dari panggung politik akibat penangkapan dan proses hukum, Saif al-Islam kembali muncul pada tahun 2021 dengan mencalonkan diri sebagai presiden. Kehadirannya justru menimbulkan perdebatan dan konflik politik baru, hingga akhirnya berkontribusi pada gagalnya pelaksanaan pemilu nasional. Hal ini menunjukkan bahwa sosok Saif memiliki pengaruh besar dalam dinamika politik Libya, baik sebagai potensi pemersatu maupun sebagai sumber perpecahan.

Situasi politik Libya kembali mengalami guncangan setelah Saif al-Islam Gaddafi dilaporkan tewas pada 3 Februari 2026 di Zintan akibat ditembak oleh orang tak dikenal. Kematian ini menimbulkan dampak yang kompleks. Di satu sisi, hilangnya Saif berpotensi melemahkan kelompok pro-Gaddafi yang selama ini menjadikannya sebagai simbol dan figur pemersatu. Di sisi lain, kepergiannya juga dapat menghilangkan salah satu hambatan utama dalam proses politik, khususnya dalam upaya penyelenggaraan pemilu dan stabilitas negara. Kematian Saif al-Islam Gaddafi berkaitan dengan rumitnya dinamika politik Libya yang terpecah. Sebagai figur yang memiliki potensi untuk menyatukan pendukung rezim lama sekaligus memengaruhi keseimbangan kekuasaan, keberadaannya dipandang sebagai ancaman oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, kematiannya berpotensi menguntungkan aktor-aktor yang merasa terancam oleh kemungkinan kembalinya pengaruh politiknya. Selain itu, dalam konteks Libya yang dipenuhi oleh berbagai kelompok bersenjata dengan kepentingan yang beragam, peristiwa ini juga dapat dipahami sebagai bagian dari persaingan kekuasaan antar milisi yang berupaya memperkuat posisi masing-masing. Di sisi lain, keterlibatan Saif dalam kontestasi politik, termasuk pencalonannya sebagai presiden yang memicu kontroversi dan berkontribusi terhadap tertundanya proses pemilu, menjadikannya sebagai figur yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai hambatan dalam proses politik. Dengan demikian, kematiannya dapat pula dilihat sebagai upaya untuk menghilangkan faktor pengganggu dalam dinamika politik Libya yang sedang berlangsung.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis krisis kepemimpinan yang muncul pasca-kematian Saif al-Islam Gaddafi serta implikasinya terhadap stabilitas politik di Libya. Penelitian ini akan menyoroti bagaimana kehilangan figur penting dapat memengaruhi keseimbangan kekuasaan, memperdalam fragmentasi politik, serta mempengaruhi prospek masa depan stabilitas negara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena krisis kepemimpinan pasca-kematian Saif al-Islam Gaddafi serta implikasinya terhadap stabilitas politik di Libya, bukan untuk mengukur dalam bentuk angka. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan fokus pada dinamika politik Libya setelah tahun 2026, sehingga memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara rinci konteks politik, aktor-aktor yang terlibat, serta perubahan yang terjadi setelah hilangnya figur kunci tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan organisasi internasional, serta berita dari media terpercaya yang membahas perkembangan politik Libya, khususnya terkait peristiwa kematian Saif al-Islam Gaddafi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan cara mengumpulkan data yang relevan, mengelompokkan informasi berdasarkan tema seperti kepemimpinan, konflik, dan stabilitas politik, kemudian menafsirkan hubungan antar peristiwa dan aktor politik untuk menarik kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda agar data yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipercaya. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat



memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana krisis kepemimpinan setelah kematian Saif al-Islam Gaddafi mempengaruhi stabilitas politik di Libya.

LITERATURE REVIEW

Kajian mengenai dinamika politik Libya pasca runtuhnya rezim Muammar Gaddafi pada tahun 2011 telah menjadi perhatian utama dalam studi hubungan internasional, khususnya dalam isu *state fragility*, konflik internal, dan transformasi politik pasca-otoritarian. Berbagai penelitian sebelumnya secara umum dapat dikategorikan ke dalam tiga tema utama, yaitu fragmentasi negara dan munculnya aktor non-negara, peran milisi dan struktur sosial seperti suku dalam politik Libya, serta kelemahan institusi negara dalam konteks *failed state*.

Tema pertama menyoroti bagaimana runtuhnya rezim Gaddafi menciptakan kekosongan kekuasaan yang tidak diikuti dengan pembentukan institusi politik yang kuat. Combaz menunjukkan bahwa Libya pasca-2011 mengalami transformasi menuju sistem politik yang sangat terfragmentasi, di mana kekuasaan tidak lagi terpusat pada negara, melainkan tersebar di berbagai aktor lokal dan regional. Dalam konteks ini, negara kehilangan kapasitas untuk mengontrol wilayahnya secara efektif, sehingga menciptakan kondisi ketidakstabilan yang berkelanjutan.

Tema kedua berkembang pada kajian mengenai peran milisi dan kelompok sosial dalam menggantikan fungsi negara. Studi oleh CGRS et al. menekankan bahwa milisi tidak hanya berfungsi sebagai aktor keamanan, tetapi juga sebagai aktor politik yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan nasional. Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa struktur sosial seperti suku memainkan peran penting dalam distribusi kekuasaan, terutama ketika negara tidak mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal. Dalam kondisi tersebut, identitas lokal dan loyalitas kelompok menjadi faktor utama dalam dinamika politik Libya.

Tema ketiga berkaitan dengan analisis Libya sebagai *failed state*. Rotberg mengemukakan bahwa negara gagal ditandai dengan hilangnya monopoli negara atas penggunaan kekerasan yang sah serta meningkatnya konflik internal yang tidak terkendali. Analisis ini diperkuat oleh laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menunjukkan bahwa konflik berkepanjangan telah merusak struktur ekonomi, memperlemah sistem pelayanan publik, serta meningkatkan ketimpangan sosial di Libya. Literatur yang ada secara konsisten menggambarkan Libya sebagai negara dengan kapasitas institusional yang lemah dan rentan terhadap instabilitas politik.

Selain ketiga tema tersebut, perkembangan literatur terbaru mulai menunjukkan adanya pergeseran fokus dari pendekatan struktural menuju pendekatan yang lebih menekankan peran agen (*agency*), khususnya figur kepemimpinan, dalam menentukan stabilitas politik di negara yang mengalami konflik. Dalam perspektif kepemimpinan karismatik, Weber menekankan bahwa dalam situasi krisis legitimasi, otoritas politik tidak lagi semata-mata bertumpu pada institusi formal, melainkan berpindah kepada individu yang dianggap memiliki kapasitas personal untuk memulihkan keteraturan serta memberikan arah politik yang jelas. Dalam konteks negara yang mengalami kelemahan institusional seperti Libya, fenomena ini menjadi semakin signifikan. Ketika institusi negara tidak mampu menjalankan fungsi dasarnya secara efektif, seperti menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan mengelola konflik politik, maka legitimasi politik cenderung mengalami personalisasi (*personalization of power*). Artinya, stabilitas politik tidak lagi ditentukan oleh kekuatan sistem atau institusi, melainkan bergantung pada keberadaan figur tertentu yang mampu mengonsolidasikan dukungan politik dari berbagai kelompok yang terfragmentasi.

Dalam kerangka ini, diskursus mengenai Saif al-Islam Gaddafi muncul sebagai bagian dari perdebatan yang lebih luas mengenai kemungkinan rekonsiliasi politik dan konsolidasi kekuasaan di Libya. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa Saif tidak hanya dipahami sebagai representasi rezim lama, tetapi juga sebagai figur yang memiliki potensi untuk menjembatani fragmentasi politik, khususnya di kalangan loyalis Gaddafi serta sebagian kelompok masyarakat yang menginginkan stabilitas politik setelah periode konflik yang panjang. Kehadirannya dalam kontestasi politik, termasuk upaya pencalonan dalam pemilu, memperlihatkan bahwa figur ini masih memiliki daya tarik politik yang signifikan dalam konteks Libya kontemporer.



Namun, literatur juga menunjukkan adanya ambiguitas dalam menilai peran Saif al-Islam. Di satu sisi, ia dipandang sebagai figur dengan legitimasi historis dan simbolik yang dapat mendukung proses rekonsiliasi nasional serta membuka peluang konsolidasi politik. Di sisi lain, keterlibatannya dalam mempertahankan rezim lama serta tuduhan pelanggaran hak asasi manusia menjadikannya figur yang kontroversial dan berpotensi memperdalam polarisasi politik. Dengan adanya hal itu, posisi Saif al-Islam dalam politik Libya tidak bersifat tunggal, melainkan berada dalam spektrum yang kompleks antara sebagai simbol stabilitas dan sekaligus sumber konflik. Meskipun sebagian besar kajian yang membahas peran Saif al-Islam masih berfokus pada potensinya sebagai aktor politik dalam kondisi “kehadiran” (*presence*), terutama dalam konteks pemilu, rekonsiliasi nasional, dan kemungkinan kembalinya pengaruh rezim lama. Pendekatan ini cenderung melihat Saif sebagai variabel yang dapat memengaruhi stabilitas politik apabila ia aktif dalam arena politik. Namun, kajian-kajian tersebut relatif belum mengembangkan analisis yang mendalam mengenai implikasi dari “ketiadaannya” (*absence*), khususnya dalam konteks krisis kepemimpinan. Dalam negara yang mengalami kondisi *fragile state*, di mana stabilitas politik sangat bergantung pada figur individu, hilangnya aktor kunci dapat memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap struktur kekuasaan. Ketiadaan figur yang memiliki legitimasi simbolik dan kemampuan konsolidasi dapat memicu kekosongan kekuasaan (*power vacuum*), yang kemudian membuka ruang bagi munculnya persaingan antar-aktor politik dan kelompok bersenjata. Dalam situasi seperti ini, krisis kepemimpinan tidak hanya terjadi karena tidak adanya pemimpin, tetapi juga karena tidak adanya figur yang mampu diterima secara luas oleh berbagai faksi yang saling bersaing. Belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji implikasi kematian Saif al-Islam Gaddafi terhadap krisis kepemimpinan di Libya. Padahal, sebagai figur yang memiliki potensi legitimasi di kalangan tertentu, keberadaan maupun ketiadaannya berpotensi mempengaruhi keseimbangan kekuasaan secara signifikan. Kematian seorang figur politik dalam konteks negara yang terfragmentasi tidak hanya menghilangkan satu aktor, tetapi juga dapat mengubah konfigurasi politik secara keseluruhan, termasuk hubungan antar kelompok, distribusi kekuasaan, serta dinamika konflik.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis dampak kematian Saif al-Islam Gaddafi terhadap dinamika krisis kepemimpinan serta implikasinya terhadap stabilitas politik di Libya. Dengan menggabungkan perspektif *failed state*, kepemimpinan karismatik, dan krisis suksesi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami bahwa dalam konteks negara rapuh, krisis politik tidak hanya dipengaruhi oleh kelemahan institusi, tetapi juga oleh hilangnya figur yang menjadi sumber legitimasi politik dan alat konsolidasi kekuasaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Saif al-Islam dalam Struktur Politik Libya

Dalam konteks politik Libya pasca-2011, peran Saif al-Islam tidak dapat dilepaskan dari struktur negara yang lemah dan terfragmentasi. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa setelah jatuhnya rezim Gaddafi, Libya mengalami kegagalan dalam membangun institusi negara yang kuat, sehingga kekuasaan tidak lagi terpusat, melainkan tersebar ke berbagai aktor lokal, milisi bersenjata, serta kelompok berbasis suku dan wilayah. Combaz menjelaskan bahwa kondisi ini mencerminkan transformasi Libya menuju sistem politik yang terfragmentasi, di mana negara kehilangan kapasitas untuk mengendalikan wilayah dan aktor politik secara efektif. Kondisi tersebut pada akhirnya menciptakan sistem politik yang tidak stabil, di mana tidak ada satu otoritas tunggal yang mampu mengendalikan seluruh wilayah atau mengkonsolidasikan kekuasaan secara efektif.

Perpecahan ini juga menyebabkan munculnya dinamika politik yang sangat kompetitif, di mana setiap aktor berusaha mempertahankan atau memperluas pengaruhnya sesuai dengan kepentingan masing-masing. Dalam situasi seperti ini, struktur formal negara sering kali tidak menjadi aktor utama dalam menentukan arah politik, melainkan hanya salah satu dari banyak pusat kekuasaan yang saling bersaing. Hal ini sejalan dengan temuan CGRS et al. yang menunjukkan bahwa dalam konteks Libya, milisi tidak hanya berfungsi sebagai aktor keamanan, tetapi juga sebagai aktor politik yang memiliki peran penting dalam menentukan distribusi kekuasaan. Maka dari itu, Libya pasca-2011 tidak hanya



mengalami krisis institusional, tetapi juga krisis legitimasi politik yang lebih luas, di mana otoritas negara tidak lagi menjadi satu-satunya sumber kekuasaan yang diakui. Dalam kondisi tersebut, figur individu sering kali muncul sebagai sumber legitimasi alternatif. Ketika institusi negara tidak mampu menjalankan fungsi dasarnya secara efektif, legitimasi politik cenderung berpindah dari sistem formal ke individu yang dianggap memiliki kapasitas atau pengaruh tertentu. Weber menjelaskan bahwa dalam situasi krisis legitimasi, otoritas dapat bergeser dari institusi menuju figur yang memiliki daya tarik personal dan kemampuan memimpin. Dalam konteks Libya, Saif al-Islam, dengan latar belakang politik sebagai bagian dari keluarga Gaddafi serta citranya sebagai figur yang relatif lebih moderat dan memiliki jaringan internasional, memiliki potensi untuk mengisi ruang tersebut. Keberadaan Saif dapat dipahami sebagai bentuk “jembatan politik” antara masa lalu dan masa depan Libya. Bagi sebagian kelompok, terutama loyalis rezim lama, ia mewakili stabilitas dan kontinuitas politik yang hilang sejak 2011. Namun bagi kelompok lain, ia tetap dipandang sebagai bagian dari rezim yang harus ditinggalkan, terutama karena keterkaitannya dengan pemerintahan sebelumnya. Ambivalensi ini justru memperkuat posisi Saif sebagai figur yang signifikan, karena keberadaannya selalu menjadi titik tarik-menarik kepentingan politik di Libya, sekaligus mencerminkan polarisasi yang masih kuat dalam masyarakat.

Dalam kerangka negara rapuh (*fragile state*), kondisi ini menunjukkan bahwa legitimasi politik tidak sepenuhnya berasal dari institusi, tetapi juga dari figur yang memiliki pengaruh sosial dan simbolik. Dengan kata lain, stabilitas politik menjadi sangat bergantung pada kemampuan individu untuk mengkonsolidasikan dukungan dari berbagai kelompok yang terfragmentasi. Dalam situasi seperti ini, keberadaan satu figur dapat berfungsi sebagai faktor penyeimbang dalam sistem politik yang tidak stabil, meskipun sifatnya cenderung sementara. Analisis dari Chatham House memperkuat pemahaman ini dengan menyebut bahwa kematian Saif al-Islam menandai “akhir dari sebuah era politik” di Libya. Pernyataan ini tidak hanya menunjukkan pentingnya posisi Saif sebagai individu, tetapi juga mengindikasikan bahwa ia merupakan bagian dari konfigurasi kekuasaan yang lebih besar. Dengan kata lain, hilangnya Saif tidak hanya berarti kehilangan satu aktor politik, tetapi juga hilangnya salah satu kemungkinan arah perkembangan politik Libya yang sebelumnya masih terbuka.

Peran Saif al-Islam dalam politik Libya tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural. Ia menjadi bagian dari mekanisme yang memungkinkan adanya potensi konsolidasi politik dalam sistem yang terfragmentasi. Ketika figur tersebut hilang, dampaknya tidak hanya dirasakan pada level individu, tetapi juga pada keseimbangan kekuasaan secara keseluruhan. Kondisi ini kemudian berkontribusi terhadap munculnya krisis kepemimpinan serta meningkatnya ketidakstabilan politik di Libya, karena tidak adanya figur lain yang mampu mengisi peran serupa dalam konteks sistem politik yang lemah dan terfragmentasi.

B. Kematian Saif dan Konteks Negara Rapuh

Kematian Saif al-Islam pada Februari 2026, sebagaimana dilaporkan oleh berbagai media internasional, terjadi dalam konteks keamanan yang belum stabil dan lemahnya kontrol negara terhadap penggunaan kekerasan. Peristiwa ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi politik Libya yang sejak 2011 ditandai oleh fragmentasi kekuasaan dan dominasi aktor non-negara dalam menentukan dinamika keamanan. Dalam situasi di mana negara tidak memiliki otoritas penuh atas wilayahnya, tindakan kekerasan terhadap aktor politik menjadi lebih mungkin terjadi, termasuk terhadap figur dengan tingkat visibilitas dan pengaruh seperti Saif al-Islam.

Dalam perspektif *failed state*, kondisi ini mencerminkan ketidakmampuan negara untuk menjalankan fungsi dasarnya, khususnya dalam menjaga keamanan dan melindungi aktor politik penting. Rotberg menegaskan bahwa salah satu indikator utama negara gagal adalah hilangnya monopoli negara atas penggunaan kekerasan yang sah. Dalam kasus Libya, monopoli tersebut telah lama terfragmentasi dan tersebar di berbagai kelompok milisi yang beroperasi secara independen. Hal ini menciptakan situasi di mana keamanan tidak lagi dijamin oleh negara, melainkan bergantung pada keseimbangan kekuatan antar kelompok bersenjata. Lemahnya kontrol negara terhadap kekerasan tidak hanya berdampak pada meningkatnya konflik, tetapi juga pada munculnya praktik kekerasan politik sebagai instrumen dalam perebutan kekuasaan. Dalam konteks ini, pembunuhan terhadap figur politik dapat dipahami bukan hanya sebagai tindakan kriminal, tetapi juga sebagai bagian dari strategi politik



yang dilakukan oleh aktor tertentu untuk mengubah atau mengontrol konfigurasi kekuasaan. Dengan kata lain, kematian Saif al-Islam dapat dilihat sebagai refleksi dari bagaimana kekerasan telah menjadi bagian dari mekanisme politik di Libya. Selain itu, laporan internasional menunjukkan bahwa sejak 2011 Libya mengalami konflik berkepanjangan yang merusak struktur ekonomi dan sosial serta memperlemah institusi negara. Ketidakstabilan ini menciptakan lingkaran setan (*vicious cycle*), di mana lemahnya institusi negara memperkuat peran aktor non-negara, dan dominasi aktor non-negara pada gilirannya semakin melemahkan negara. Dalam situasi seperti ini, setiap peristiwa kekerasan, termasuk kematian Saif al-Islam, tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari pola yang lebih luas.

Kematian Saif tidak dapat dipahami hanya sebagai peristiwa individual, melainkan sebagai manifestasi dari kondisi struktural yang telah lama berkembang di Libya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan politik di Libya bukan hanya disebabkan oleh faktor jangka pendek, tetapi juga oleh kelemahan sistemik yang telah mengakar dalam struktur negara. Maka dari itu, analisis terhadap kematian Saif al-Islam harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sebagai bagian dari dinamika negara rapuh yang mengalami krisis legitimasi, fragmentasi kekuasaan, dan ketidakmampuan dalam mengelola kekerasan secara efektif. Peristiwa ini juga memperlihatkan keterkaitan erat antara keamanan, legitimasi, dan kepemimpinan dalam konteks negara rapuh. Ketika negara tidak mampu menjamin keamanan, legitimasi politik menjadi semakin lemah, dan pada saat yang sama kebutuhan akan figur kepemimpinan yang kuat menjadi semakin tinggi. Namun, ketika figur tersebut justru menjadi korban dari kondisi ketidakamanan, maka siklus ketidakstabilan menjadi semakin sulit untuk diputus. Peristiwa ini menegaskan bahwa kematian Saif al-Islam tidak hanya mencerminkan kegagalan negara dalam melindungi individu, tetapi juga memperlihatkan keterbatasan negara dalam menjaga stabilitas sistem politik secara keseluruhan.

C. Tidak Adanya Pengganti yang Jelas dalam Konteks Fragmentasi

Hilangnya Saif al-Islam memperlihatkan adanya ketergantungan yang cukup kuat pada figur individu dalam sistem politik Libya. Dalam kondisi di mana institusi negara belum mampu berfungsi secara efektif, keberadaan tokoh tertentu sering kali menjadi penopang utama stabilitas politik. Oleh karena itu, ketika figur penting seperti Saif al-Islam hilang, tidak adanya pengganti yang jelas dapat memperburuk ketidakstabilan yang sudah ada sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem politik Libya belum memiliki mekanisme kelembagaan yang kuat untuk menjamin keberlanjutan kepemimpinan secara terstruktur. Kajian mengenai politik Libya menunjukkan bahwa kekuasaan tidak terpusat pada satu otoritas, melainkan tersebar di berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda-beda, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Fragmentasi ini menyebabkan tidak adanya satu kekuatan dominan yang mampu mengatur atau mengarahkan dinamika politik secara keseluruhan. Dalam situasi seperti ini, figur individu yang memiliki legitimasi simbolik dan jaringan politik yang luas menjadi sangat penting sebagai penghubung antar kelompok yang terfragmentasi.

Namun, ketika figur tersebut tidak lagi ada, kemampuan untuk mengkonsolidasikan dukungan menjadi semakin lemah. Ketiadaan figur pemersatu ini berpotensi memperdalam fragmentasi yang sudah ada, karena masing-masing aktor cenderung bergerak berdasarkan kepentingannya sendiri tanpa adanya koordinasi yang kuat. Hal ini juga dapat memicu munculnya konflik baru, baik dalam bentuk persaingan politik maupun kekerasan terbuka, karena tidak ada pihak yang memiliki otoritas cukup untuk menengahi atau mengendalikan situasi. Selain itu, penelitian mengenai peran milisi menunjukkan bahwa dalam kondisi negara yang lemah, aktor non-negara seperti kelompok bersenjata dan jaringan lokal akan mengambil alih fungsi-fungsi yang seharusnya dijalankan oleh negara, termasuk dalam hal keamanan dan kontrol wilayah. Dalam konteks Libya, milisi tidak hanya berperan sebagai aktor keamanan, tetapi juga sebagai aktor politik yang memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi kekuasaan.

Hilangnya figur seperti Saif al-Islam dalam situasi ini dapat membuka ruang yang lebih besar bagi milisi dan kelompok bersenjata untuk memperluas pengaruhnya. Tanpa adanya figur yang mampu mengkonsolidasikan kekuatan politik secara lebih luas, milisi cenderung memperkuat posisi mereka masing-masing, yang pada akhirnya memperdalam fragmentasi kekuasaan. Hal ini juga dapat menyebabkan meningkatnya otonomi kelompok bersenjata, sehingga semakin sulit bagi negara untuk



membangun kembali otoritasnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan politik di Libya tidak hanya disebabkan oleh lemahnya institusi negara, tetapi juga oleh struktur kekuasaan yang sangat bergantung pada figur tertentu. Ketika figur tersebut hilang, sistem politik menjadi rentan terhadap ketidakpastian dan konflik karena tidak adanya mekanisme yang mampu menggantikan peran tersebut secara efektif. Tidak adanya pengganti yang jelas setelah kematian Saif al-Islam bukan hanya menciptakan kekosongan kepemimpinan, tetapi juga memperlihatkan keterbatasan sistem politik Libya dalam mengelola transisi kekuasaan secara stabil.

D. Dampak terhadap Stabilitas Politik dan Keamanan

Kematian Saif al-Islam Gaddafi memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika politik Libya, khususnya dalam memperdalam fragmentasi kekuasaan yang telah berlangsung sejak 2011. Hilangnya figur yang sebelumnya memiliki potensi sebagai pemersatu menyebabkan semakin sulitnya upaya untuk menjembatani berbagai kepentingan politik yang saling bertentangan. Dalam kondisi di mana struktur politik Libya telah terpecah ke dalam berbagai kelompok dan faksi, keberadaan figur seperti Saif memiliki peran penting sebagai titik konsolidasi. Namun, ketika figur tersebut tidak lagi ada, maka tidak terdapat lagi aktor yang mampu mengintegrasikan kepentingan yang beragam tersebut, sehingga memperkuat kondisi Libya sebagai negara dengan banyak pusat kekuasaan yang saling bersaing. Dampak ini tidak hanya terbatas pada aspek politik, tetapi juga merambat ke sektor keamanan. Lemahnya kontrol negara terhadap penggunaan kekerasan membuat perubahan dalam keseimbangan kekuasaan menjadi sangat sensitif dan berpotensi memicu konflik baru. Dalam konteks ini, kematian Saif dapat dipahami sebagai salah satu faktor yang mengganggu keseimbangan yang sebelumnya terbentuk, meskipun bersifat tidak stabil. Tanpa adanya figur yang memiliki pengaruh luas, kelompok-kelompok bersenjata cenderung bertindak secara lebih independen dan kompetitif dalam mempertahankan atau memperluas wilayah kekuasaan mereka. Kondisi ini sejalan dengan karakteristik negara gagal, di mana konflik internal menjadi fenomena yang terus berulang akibat tidak adanya otoritas tunggal yang mampu mengendalikan situasi secara efektif. Ketidakstabilan politik dan keamanan tersebut juga memberikan dampak langsung terhadap kondisi ekonomi Libya. Konflik yang berkepanjangan telah merusak struktur ekonomi nasional, mengganggu aktivitas produksi, serta menurunkan kepercayaan investor terhadap stabilitas negara. Dalam situasi seperti ini, setiap bentuk ketidakpastian politik tambahan, termasuk kematian tokoh penting seperti Saif al-Islam, berpotensi memperburuk kondisi ekonomi yang sudah rapuh. Ketidakmampuan negara dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan akhirnya menciptakan hambatan serius bagi proses pembangunan dan pemulihan ekonomi.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa dampak kematian Saif al-Islam tidak bersifat sektoral, melainkan saling terkait antara politik, keamanan, dan ekonomi. Ketiga aspek tersebut membentuk suatu lingkaran ketidakstabilan yang saling memperkuat, di mana fragmentasi politik memicu konflik keamanan, dan konflik tersebut pada akhirnya memperburuk kondisi ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks Libya sebagai negara rapuh, perubahan pada satu aspek tidak dapat dipisahkan dari dampaknya terhadap aspek lainnya.

E. Analisis: Hubungan antara Struktur dan Figur

Peristiwa kematian Saif al-Islam menunjukkan bahwa dalam konteks negara rapuh, stabilitas politik tidak hanya ditentukan oleh kekuatan institusi, tetapi juga oleh keberadaan figur yang memiliki legitimasi sosial. Dalam situasi di mana institusi negara belum mampu berfungsi secara optimal, peran individu menjadi semakin penting sebagai sumber legitimasi alternatif yang dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh lemahnya struktur formal. Hal ini terlihat jelas dalam konteks Libya, di mana fragmentasi politik dan lemahnya kontrol negara terhadap wilayahnya membuat keberadaan figur tertentu menjadi penentu dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.

Di satu sisi, kondisi struktur negara yang lemah menciptakan ruang bagi munculnya figur individu sebagai aktor penting dalam dinamika politik. Figur seperti Saif al-Islam tidak hanya berfungsi sebagai aktor politik biasa, tetapi juga sebagai simbol yang mampu menghubungkan berbagai kelompok yang terfragmentasi. Dalam konteks ini, keberadaannya memberikan kemungkinan bagi terciptanya konsolidasi politik, meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan konflik yang ada. Dengan kata lain,



figur individu dalam negara rapuh seringkali berperan sebagai “penyeimbang sementara” dalam sistem politik yang tidak stabil. Namun, di sisi lain, ketergantungan yang tinggi terhadap figur individu justru menciptakan kerentanan baru dalam sistem politik. Ketika stabilitas terlalu bergantung pada satu tokoh, maka hilangnya tokoh tersebut akan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap keseluruhan struktur kekuasaan. Dalam kasus Libya, kematian Saif al-Islam tidak hanya berarti hilangnya satu aktor politik, tetapi juga hilangnya salah satu kemungkinan jalur konsolidasi kekuasaan yang sebelumnya masih terbuka. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya ketidakpastian politik, karena tidak ada figur lain yang mampu menggantikan peran tersebut secara setara.

Ketiadaan figur pengganti yang memiliki legitimasi serupa memperkuat fragmentasi yang sudah ada. Dalam situasi ini, aktor-aktor politik dan kelompok bersenjata cenderung bergerak secara independen berdasarkan kepentingannya masing-masing, tanpa adanya koordinasi yang kuat. Hal ini tidak hanya memperdalam perpecahan politik, tetapi juga meningkatkan potensi konflik, karena setiap aktor berusaha mengisi kekosongan kekuasaan yang muncul. Maka dari itu, hilangnya figur kunci dalam negara rapuh tidak hanya menciptakan kekosongan kepemimpinan, tetapi juga mempercepat proses disintegrasi politik. Selain itu, fenomena ini juga menunjukkan adanya hubungan yang erat antara struktur dan agen dalam menentukan stabilitas politik. Di satu sisi, kelemahan institusi menciptakan kebutuhan akan figur individu, tetapi di sisi lain, ketergantungan pada figur tersebut justru menghambat pembentukan sistem politik yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dengan kata lain, negara seperti Libya terjebak dalam kondisi paradoks, di mana keberadaan figur diperlukan untuk menjaga stabilitas jangka pendek, tetapi pada saat yang sama justru memperlemah kemungkinan stabilitas jangka panjang.

Dengan demikian, krisis kepemimpinan di Libya tidak dapat dipahami hanya sebagai akibat dari kelemahan institusi negara, tetapi juga sebagai konsekuensi dari hilangnya figur yang sebelumnya berpotensi menjadi titik konsolidasi kekuasaan. Peristiwa kematian Saif al-Islam memperlihatkan bahwa dalam konteks negara rapuh, stabilitas politik sangat bergantung pada interaksi antara struktur yang lemah dan peran individu yang kuat. Ketika salah satu elemen tersebut terganggu, maka keseluruhan sistem politik menjadi rentan terhadap ketidakstabilan yang lebih dalam.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kematian Saif al-Islam Gaddafi pada 3 Februari 2026 merupakan peristiwa yang memiliki implikasi yang signifikan terhadap krisis kepemimpinan dan stabilitas politik di Libya. Dalam konteks negara yang telah mengalami fragmentasi politik sejak jatuhnya rezim Muammar Gaddafi pada tahun 2011, hilangnya figur yang memiliki legitimasi simbolik dan pengaruh politik seperti Saif al-Islam tidak hanya berdampak pada level individu, tetapi juga pada struktur kekuasaan secara keseluruhan.

Pertama, peran Saif al-Islam dalam politik Libya menunjukkan bahwa dalam kondisi negara yang lemah, figur individu dapat menjadi sumber legitimasi alternatif yang berfungsi sebagai titik konsolidasi kekuasaan. Keberadaannya mencerminkan kemungkinan stabilisasi politik, meskipun tetap berada dalam konteks yang penuh kontroversi dan polarisasi. Namun, kematiannya justru menutup salah satu peluang konsolidasi tersebut, sehingga memperkuat kondisi fragmentasi politik yang telah ada sebelumnya.

Kedua, kematian Saif al-Islam mencerminkan lemahnya kapasitas negara dalam menjalankan fungsi dasar, khususnya dalam menjaga keamanan dan mengontrol penggunaan kekerasan. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa kekerasan politik masih menjadi bagian dari dinamika kekuasaan di Libya, yang menunjukkan karakter negara sebagai *failed state*. Dengan demikian, kematian Saif tidak dapat dipahami sebagai peristiwa terpisah, melainkan sebagai bagian dari pola konflik struktural yang telah berlangsung lama.

Ketiga, tidak adanya pengganti yang jelas setelah hilangnya Saif al-Islam memperlihatkan ketergantungan sistem politik Libya terhadap figur individu. Kondisi ini menyebabkan munculnya kekosongan kepemimpinan yang kemudian memperburuk persaingan antar aktor politik dan kelompok



bersenjata. Tanpa adanya figur yang mampu mengonsolidasikan berbagai kepentingan, sistem politik menjadi semakin tidak stabil dan rentan terhadap konflik.

Keempat, dampak dari peristiwa ini tidak hanya terbatas pada aspek politik, tetapi juga meluas ke sektor keamanan dan ekonomi. Fragmentasi politik yang semakin dalam mendorong meningkatnya potensi konflik, yang pada akhirnya memperburuk kondisi ekonomi yang sudah terdampak oleh konflik berkepanjangan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks negara rapuh, ketidakstabilan pada satu sektor akan dengan cepat merambat ke sektor lainnya.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa krisis kepemimpinan di Libya tidak hanya disebabkan oleh kelemahan institusi negara, tetapi juga oleh hilangnya figur yang sebelumnya berpotensi menjadi titik konsolidasi kekuasaan. Dengan kata lain, stabilitas politik di negara rapuh seperti Libya sangat bergantung pada interaksi antara struktur yang lemah dan peran individu yang kuat. Ketika salah satu elemen tersebut terganggu, maka ketidakstabilan politik menjadi semakin sulit untuk dihindari. Sebagai penutup, kematian Saif al-Islam Gaddafi mempertegas bahwa dalam konteks negara yang terfragmentasi, keberadaan maupun ketiadaan figur kepemimpinan memiliki peran krusial dalam menentukan arah stabilitas politik. Tanpa adanya penguatan institusi negara yang mampu menggantikan peran individu tersebut, Libya berpotensi terus berada dalam siklus ketidakstabilan politik yang berkepanjangan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arab Barometer. "How Libyans See Saif al-Islam Gaddafi — and What Comes Next for Libya's Politics." *Arab Barometer Research Series* 8, no. 2 (2026).
- Calvert, Peter. *The Process of Political Succession*. London: Macmillan Press, 1987.
- CGRS, Landinfo, Lifos, and Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons. *Libya: Militias, Tribes and Islamists*. Brussels: CGRS, 2014.
- Chatham House. "Killing Saif al-Islam Gaddafi Is the End of a Political Era in Libya." February 5, 2026.
- Combaz, Emilie. *Political Economy of Libya after the Qadhafi Regime*. Birmingham: GSDRC, 2014.
- Denzin, Norman K. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New Jersey: Transaction Publishers, 2009.
- Indrawan, J. "Intervensi Kemanusiaan dan Jatuhnya Kuasa Kolonel Muammar Gaddafi di Libya." *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi dan Perubahan Sosial* 4, no. 1 (2017).
- Messakh, H. P. A. "Dinamika Pembangunan Demokrasi di Libya Pasca Muammar Al-Gaddafi." Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia, 2024.
- Messner, J. J. *Fragile States Index Annual Report 2025*. Washington DC: Fund for Peace, 2025.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018.
- Putri, F. M., Zahra, N., and P. Marsingga. "International Linkage pada Konflik Bersenjata Berkepanjangan di Libya." 3, no. 1.
- Rotberg, Robert I. *When States Fail: Causes and Consequences*. Princeton: Princeton University Press, 2004.
- United Nations. *Common Country Analysis: Libya*. 2021.
- Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press, 1978.
- Willis, Michael J. "Saif al-Islam Gaddafi's Killing Must Not Close Door to Justice." *Middle East Policy Monitor* 33, no. 1 (2026).
- Willis, Michael J. "The Two Faces of Saif al-Islam Gaddafi: From Reformer to Revolutionary Target." *Journal of North African Studies* 31, no. 1 (2026).
- "The Political Team of Saif al-Islam Gaddafi Announces His Assassination in Zintan." *Libya Update*. February 4, 2026.
- "Saif al-Islam Gaddafi Has Been Killed." *Al Arabiya English*. February 3, 2026.



Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)

Journal page is available to

<https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/ijis/index>

Email: admin@jurnalcenter.com



“Saif al-Islam Gaddafi, Son of Ex-Libyan Leader, Killed, Say Officials.” *The Guardian*. February 4, 2026.